

Volume IV Nomor 1 Tahun 2014

# PROCEEDING

**SIMNAS KE 4  
ASOSIASI ILMUAN ADMINISTRASI NEGARA (ASIAN)**

**OTONOMI DESA DALAM KONTEKS  
UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014**

**KAMPUS FISIP UDAYANA, DENPASAR, 2014**



FISIP Udayana, Bali



**ASIAN**  
Asosiasi Ilmuwan  
Administrasi Negara

**SMICECOMM**  
SEMARANG MICE COMMUNITY

---

# PROCEEDING

---

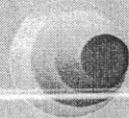
**SIMNAS KE 4  
ASOSIASI ILMUAN ADMINISTRASI NEGARA (ASiAN)**

**OTONOMI DESA DALAM KONTEKS  
UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014**

**KAMPUS FISIP UDAYANA, DENPASAR, 2014**



FISIP Udayana, Bali



**ASiAN**  
Asosiasi Ilmuwan  
Administrasi Negara

**SMICECOMM**  
SEMARANG MICE COMMUNITY

# Proceeding

## Simposium Nasional ASiAN 4

---

Editor

Dr Hardi Warsono,MTP

Drs. Harsoyo,M.Si

Dra. Maya Wulan Pramesti, MSi.

Tim Penyusun Proceeding :

Solichoel Soekaemi S.Kom, M.MPar

Nuning Kusumaning Palupi SE,M.Mpar

Setting dan Desain Cover

Nuning Kusumaning Palupi SE,M.Mpar

Diterbitkan oleh Panitia AsiAN Ke 4

Bekerjasama dengan

Fisip Udayana dan SMICECOMM

Penerbit Udayana University Press

## RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan. Pro dan kontra atas penetapan ini muncul seperti cendawan di musim hujan. Hal ini dapat dimengerti mengingat UU Nnomor 6 Tahun 2014 ini bukan Undang-undang pertama yang mengatur Desa. Ada banyak Undang-undang maupun peraturan pemerintah yang pernah mengatur tentang desa. Seperti misalnya UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa swapraja yang menunjukkan posisi desa dalam negara NKRI yang memiliki kedaulatan. Seperti pula UUNomor 6 Tahun 1969 yang merupakan maklumat politik orde baru yang mencabut dan tidak memberlakukan seluruh perundang-undangan dan peraturan tentang desa. Setelah itu, diganti dengan UU No 5 Tahun 1974, dimana posisi desa tidak lagi memiliki kedaulatan. Kedaulatan ini muncul ketika ditetapkan UU Nomor 22 Tahun 1999. Posisi kedaulatan kemudian hilang lagi ketika muncul UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti munculnya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian menjadi embrio UU Nomor 6 Tahun 2014, pada UU ini eksistensi desa mulai diperkuat.

Munculnya UU tentang Desa tidak serta merta membuat pemerintah desa paham akan tugas dan kedudukan dalam pemerintahan yang baru sebagaimana amanat UU nomor 6 Tahun 2014. Banyak persolan muncul berkaitan dengan tata cara yang harus dipahami dan harus diikuti oleh kepala desa dalam memimpin desa. Bahkan prosedur-prosedur ketatakelolaan desa banyak yang harus dipelajari secara detail membutuhkan waktu yang tidak pendek.

Munculnya Undang-Undang 6 Tahun 2014 ini, bukan hanya membuat kegundahan bagi pemerintah desa namun juga membuat gerah pemerintah kabupaten. Pasalnya ketentuan yang harus diikuti saling tumang tindih, tidak konsisten dan butuh waktu dan kecermatan untuk mempelajari. Sumber dana yang dialokasikan, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban, adalah pekerjaan rumah yang tidak ringan.

Oleh karena itu sumbangan pemikiran melalui **Simposium Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASiAN) dalam kongres ASiAN Tahun 2014 di Universitas Udayana (UNUD) Bali** sangat strategis dan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya kongkrit dan konstruktif kontribusi pemikiran terbagi dalam 4 tema besar yaitu 1) Kebijakan



Desa & Desentralisasi, 2) Akuntabilitas Dana dan Pemberdayaan Desa, 3) Desa Adat dalam Otonomi Daerah dan 4) Inovasi dan Pelayanan Publik.

Keempat tema besar tersebut akan dibahas dalam diskusi masing-masing kelompok, harapan keluaran dari hasil pemikiran Ilmuwan Administrasi Negara dapat memberikan catatan kritis guna mendorong efektifitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Simposium ini diselenggarakan untuk meneguhkan kembali apa sebenarnya sumbangan pemikiran yang dapat disampaikan oleh para dosen, peneliti dan ilmuwan dalam bidang administrasi negara terhadap persoalan-persoalan bangsa Indonesia dewasa ini. Pada acara ini akan dilakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara ini, baik pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten ataupun desa – sesuai dengan minat para pembicara. Kumpulan kritik dan rekomendasi dari setiap pembicara akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.

Pada simposium ini diharapkan akan lebih memperkenalkan kepada publik apa saja bidang kajian ilmu administrasi negara itu. Selain itu, simposium ini juga akan **“meluruskan”** kembali pemanfaatan istilah Administrasi Negara yang cenderung tereduksi ke dalam ranah yang terlampau pragmatis, teknis dan terlampau sempit oleh sebagian anggota masyarakat pemerhati permasalahan administrasi negara. Baik itu oleh masyarakat awam, masyarakat pers, maupun oleh sebagian pejabat administrasi negara itu sendiri.

Melalui simposium ini akan ditegaskan kembali bahwa bidang kajian Ilmu Administrasi Negara itu menjangkau persoalan-persoalan yang tidak saja yang terkait dengan persoalan birokrasi, melainkan juga terkait dengan persoalan kebijakan dan manajemen publik, baik pada tingkat mikro maupun makro global.

## DAFTAR ISI

Dewan Redaksi .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ringkasan .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>Kebijakan Desa &amp; Desentralisasi I</b>	
Political Education Through The Political Party To Anticipate The Non-Voter Behavior In The General Election	
<i>Dra. Aina, M.Pd</i> .....	1
Implementasi Kebijakan Bukan Untuk Publik (Menggugat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Kepala Desa Melawan Calon Kotak Kosong)	
<i>Drs. Moh. Waspa Kusuma Budi, M.Si</i> .....	16
Otonomi Daerah dan Potensi Kebijakan Publik yang Berdimensi Pelanggaran HAM di Sumatera Barat	
<i>Azwar Ananda, Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D, Heni Muchtar, Dr. Akmal, SH., MSi</i> .....	32
Analisis Dinamika Hubungan DPRD dan Kepala Daerah dalam Penyusunan Produk Legislasi Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2013	
<i>Tedi Erviantono</i> .....	49
Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	
<i>Dr. Hanif Nurcholis, M.Si</i> .....	65
Desentralisasi Desa ; Analisis Kondisi Pra Implementasi UU No 006 tahun 2014 tentang Desa	
<i>Weni Rosdiana, S.Sos, M.AP</i> .....	87
Strategi Pengembangan Pariwisata Pedesaan di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara	
<i>Dra. Dyah Hariani, MM</i> .....	95

Kerjasama Antar Desa (KADes) Dalam Kerangka Otonomi dan Desentralisasi Desa <i>Maya Wulan Pramesti</i> .....	108
Analysis of Law No. 6/2014 on Rural Based on Local Government Perspective <i>Ike Wanusmawatie</i> .....	119
Good Governance :Reposisi Administrasi Publik melalui Pemuliaan Modal Sosial Indonesia <i>Sukardi</i> .....	130
Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Amanat UU Nomor 6 Tentang Desa Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) <i>Dr. Hj. Indra Kertati, M.Si , Drs. Harsoyo Msi , Dra Aris Toening Msi dan Drs Sumarmo MSi</i> .....	153
<b>Akuntabilitas Dana &amp; Pemberdayaan Desa II</b>	
Construction Model of Women Cadres by The Political Party <i>Dra. Al Rafni, M.Si</i> .....	175
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Perspektif: Ekonomi – Sosial dan Budaya <i>Budiman Widodo, Dr Winarti Msi</i> .....	190
✓ Model Penyerapan Aspirasi dan Hambatan Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara <i>Hardi Warsono</i> .....	198
Akuntabilitas Alokasi Dana Desa: Transparansi Keuangan di Era Otonomi Desa <i>Eva Hany Fanida, Fitrotun Niswah</i> .....	216
Bintara Pembina Desa Tentara Nasional Indonesia (BABINSA TNI) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kebijakan di Kabupaten Lombok Barat) <i>Sofjan Aripin</i> .....	225

Undang-Undang Desa dan Masalah Partisipasi Perempuan	
<i>Ane Permatasari</i> .....	238
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ditinjau dari Areal Of Division Of Power	
<i>Tjitjik Rahaju</i> .....	250
<b>Desa Adat dalam OTDA III</b>	
Conseptualization of Model Good Governance Principles for Nagari of Government	
<i>M. Fachri Adnan</i> .....	266
Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Adat dan Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat	
<i>Hasbullah Malau, Dasman Lanin, Budi Kusuma</i> .....	280
Keaifan Lokal (Local Wisdom) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Provinsi Riau( Studi pada Pemerintah Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir )	
<i>Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si</i> .....	300
Menyambut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014:Signikansi Sistem Informasi Desa	
<i>Florentina Ratih Wulandari</i> .....	311
Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Dimana Meja Kerjamu?	
<i>Ayi Karyana</i> .....	321
<b>Inovasi dan Pelayanan Publik IV</b>	
Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik di Pemerintah Kota Bengkulu(Telaah Kasus Layanan Pembuatan E-KTP, SIUP dan IMB)	
<i>Iqbal M. Mujtahid, Titi Darmi</i> .....	337
Implikasi Pergeseran Peran Negara Dalam Urusan Sektor Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Publik	
<i>Dr. Bambang Istianto, M.Si</i> .....	345



Voter's Education For The Beginners Voters In Building Rational Choice In The General Election <i>Suryanef</i> .....	362
Pelayanan Prima Menuju Good Village Governance <i>Meirinawati, Indah Prabawati</i> .....	380
Model Pembinaan Motivasi Pelayanan Publik di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Instansi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat <i>Syamsir</i> .....	390
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat <i>Siti Atika Rahmi</i> .....	408
Inovasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jembarana-Provinsi Bali <i>I Made Yudhiantara</i> .....	419
Inovasi Desa Melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility) <i>Dian Arlupi Utami</i> .....	432

# MODEL PENYERAPAN ASPIRASI DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA SULAWESI TENGGARA

Hardi Warsono

## Abstraksi

*Lonjakan besaran ADD yang sangat fantastis dari Rp 3.990.000.000,- menjadi Rp26.600.000.000,- di Kabupaten Konawe Utara membutuhkan manajemen pengelolaan keuangan desa yang matang. Bagaimanakah kondisi kelembagaan masyarakat pengelola dana menjadi focus penelitian ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hendak menjawab : (i) bagaimana Model Penyerapan aspirasi Program ADD di Kabupaten Konawe Utara dan (ii) apa hambatan utama pada pelaksanaan khususnya dalam penyerapan aspirasi masyarakat Program ADD di Kabupaten Konawe Utara. Pendekatan kualitatif dengan teknik FGD dan wawancara mendalam digunakan sebagai metode penelitian. Hasil utama menunjukkan bahwa kelemahan kelembagaan desa masih menjadi penyebab tidak optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat. Untuk mengantisipasi berlakunya Undang-undang Desa, diperlukan kesiapan kelembagaan desa yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa.*

*Keywords : Dana Desa , aspirasi dan pemberdayaan*

## A. PENDAHULUAN

Model pembangunan yang melibatkan masyarakat dapat juga disebut dengan model pembangunan partisipatif. Pelaksanaan pembangunan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari tuntutan reformasi dan keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat, peralihan sistim pemerintahan dari orde baru ke sistim reformasi, yang juga didukung oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pentingnya dilaksanakan otonomi daerah, demokratisasi, partisipasi masyarakat serta desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.

Kemunculan Alokasi Dana Desa merupakan tuntutan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kedua peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa diberikan kepastian hukum terhadap Perimbangan Keuangan Desa dan Kabupaten/ Kota. Dan pemberian Alokasi Dana Desa ini merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa. Hal ini dilakukan agar desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan yang

berasal dari desa itu sendiri dengan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang daripada di desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat semakin senjang dari waktu ke waktu. Strategi pembangunan semacam ini tidak akan bisa mengatasi kemiskinan struktural. Jumlah kemiskinan di desa akan selalu lebih tinggi dan urbanisasi akan terus semakin besar. Sejalan dengan permasalahan tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang tujuannya lebih mengarah pada pembangunan skala desa.

Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c, dijelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Peraturan mengenai Alokasi Dana Desa ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Alokasi dana Desa yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia untuk segera merealisasikan Alokasi dana Desa, terutama kepada Kabupaten/Kota yang sama sekali belum melaksanakan Alokasi Dana Desa. Dalam Surat Edaran tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan jelas menyebutkan bahwa percepatan Alokasi Dana Desa dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa atau biasanya disebut ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan Perintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (pasal 1 ayat 11, PP Nomor 72/2005). Maksud dari pemberian Alokasi dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan pemberina Alokasi Dana Desa itu sendiri antara lain yaitu meliputi :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- 5) Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta SE Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa, di Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan DPRD telah menetapkan sebuah Kebijakan Alokasi Dana Desa serta Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis atau Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan mulai tahun 2011, hal ini adalah merupakan implementasi dari kebijakan otonomi desa di Kabupaten Konawe Utara.
- 6) Kabupaten Konawe Utara Terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2007, yang merupakan salah satu pemekaran dari Kabupaten Konawe sebagai kabupaten Induknya. Tujuan pemekaran adalah untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Konawe Utara pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- 7) Pembentukan Kabupaten Konawe Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Sebagai salah satu kabupaten yang baru di mekarkan tentunya kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana masih sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara. (Undang-Undang No 13 Tahun 2007).
- 8) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan ADD. Pelaksanaan ADD di Kabupaten Konawe Utara ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.



- 9) Di Kabupaten Konawe Utara, Kebijakan Alokasi Dana Desa dimulai pada tahun 2011. Maksud diberikannya adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan skala desa sebagai bentuk implementasi kebijakan otonomi desa. Kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa harus dikonsentrasikan pada kegiatan-kegiatan yang telah tercantum pada hasil musrenbangdes yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, prasarana fisik dan umum. Untuk melihat peningkatan anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat dari table 1:

Tabel 1  
Perkembangan Alokasi Dana Desa Kabupaten Konawe Utara

No	Tahun	Jumlah APBD (Rp)	Besaran ADD (Rp)
1.	2011	476.212.362.566	3.325.000.000,-
2.	2012	518.989.047.025	3.990.000.000,-
3.	2013	581.236.387.671	26.600.000.000,-

Sumber: Badan PMD Kabupaten Konawe Utara, 2013

Lonjakan besaran ADD yang sangat fantastis dari Rp 3.99.000.000,- menjadi Rp26.600.000.000,- membutuhkan manajemen pengelolaan yang matang. Bagaimanakah kondisi kelembagaan masyarakat pengelola dana menjadi focus penelitian ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hendak menjawab : (i) bagaimana Model Penyerapan aspirasi Program ADD di Kabupaten Konawe Utara ?, (ii) apa hambatan utama pada pelaksanaan khususnya dalam penyerapan aspirasi masyarakat Program ADD di Kabupaten Konawe Utara?

Hariman Pamuji (2011), dengan penelitian yang berjudul “Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan” menyimpulkan bahwa Kebijakan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Pendapatan masyarakat Kecamatan Kota Pinang meningkat setelah adanya program ADD.

Dini Gemala Sari (2010), dengan penelitian “Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat” memfokuskan pada Hubungan

Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup berarti antara Alokasi Dana Desa dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan terdapat persepsi positif masyarakat tentang manfaat penggunaan Alokasi Desa dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Wira Gusni Simanjuntak (2010), dengan penelitian "Analisis Alokasi Dana Desa APBD Serdang Bedagai Terhadap Pengembangan Desa Di Kecamatan Sei Rampah" Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada perbedaan pendapatan rata-rata rumah tangga setelah pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Sei Rampah dan menganalisis manfaat Alokasi Dana Desa terhadap Pengembangan Desa dari tanggapan pimpinan desa dan masyarakat di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: Ada perbedaan pendapatan masyarakat setelah pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sei Rampah.

Dari beberapa penelitian tersebut nampak bahwa ADD sudah dirasa manfaatnya bagi masyarakat desa.

## **B. KERANGKA TEORI**

Latar belakang munculnya kegiatan analisis kebijakan dipicu oleh banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak memuaskan dalam arti tidak dapat memecahkan masalah, bahkan justru memunculkan masalah-masalah baru. Cakupan proses analisis kebijakan umumnya meliputi : identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik. Proses analisis kebijakan kadangkala dilakukan sebelum mengambil menentukan alternatif terbaik untuk diimplementasikan atau setelah alternatif terbaik diimplementasikan.

### **(1). Identifikasi masalah**

Identifikasi masalah merupakan proses untuk mengenali dan menentukan permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Informasi tentang masalah kebijakan publik ini dapat diperoleh berbagai indikator pembangunan semacam standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib, evaluasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), laporan-laporan survai, jurnal-jurnal atau interview langsung ke masyarakat.

## (2). Identifikasi alternatif

Apabila tujuan yang hendak dicapai telah disetujui, pertanyaan pada tahap berikutnya adalah model atau teori apa yang mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan berdasarkan analisis tersebut dikembangkan alternatif-alternatif kebijakan. Pada tahap ini pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah adakah hubungan logis antara masing-masing alternatif dengan tujuan.

Untuk dapat mengidentifikasi alternatif yang tepat seorang analis harus memiliki teori yang cukup pada masalah yang akan dipecahkan. Dengan bekal teori analis akan mengurai ke dalam faktor-faktor penyebab permasalahan dan menterjemahkan ke dalam alternatif pemecahan masalah. Aspek teoritis haruslah dikuatkan dengan aspek praktis agar alternatif kebijakan dapat dioperasionalkan.

## (3) seleksi alternatif

Untuk dapat menyeleksi dan memilih alternatif-alternatif kebijakan yang nantinya akan diajukan kepada *policy makers*, diperlukan kriteria atau standar yang rasional. Berdasarkan kriteria atau standar rasional tersebut seorang analis dapat merekomendasikan alternatif terbaiknya.

Bardach dalam Patton & Sawicki (1986) mengemukakan beberapa kriteria seleksi alternatif yang meliputi :

- a. *technical feasibility*,
- b. *economic and financial possibility*
- c. *political viability*
- d. *administratif operability*

Sementara Dunn (1994) juga mengemukakan 4 (empat) kriteria "multi rational" sebagai berikut :

- a. *technical rationality*
- b. *economic rationality*
- c. *legal rationality*
- d. *social rationality*

Pendekatan multi rationality ini memilih atau merekomendasikan alternatif kebijakan terbaiknya dengan menggunakan system ranking. Selain system ranking dapat digunakan system indeks bila bobot dari masing-masing kriteria sama. Namun demikian, pemilihan kriteria sebenarnya sangat tergantung dari tujuan. Beberapa tujuan yang berbeda antara lain :

penanaman nilai budaya baru, keuntungan ekonomis, kepentingan politis. Oleh karenanya diperlukan pembobotan yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan.

Secara umum penentuan kriteria menggunakan dua prinsip, yakni : (1) rasionalitas (2) demokrasi. **Prinsip rasionalitas** diterapkan untuk mendapatkan alternatif terbaik sesuai kaidah keilmuan seperti analisis biaya dan manfaat. Harus dihitung beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk implementasi masing-masing alternatif dan seberapa manfaat yang bisa didapatkan bila salah satu alternatif diimplementasikan. Perhitungan dan perbandingan dapat dilakukan berdasarkan kriteria yang disepakati, namun karena umumnya terdapat keterbatasan informasi atau kemampuan analisis, maka diperlukan prinsip ke dua yakni demokrasi. **Prinsip demokrasi** adalah prinsip seleksi alternatif dengan melibatkan *stakeholders*. Alternatif hanya dapat diterima bila disetujui para *stakeholders* atau pihak yang berkepentingan melalui forum dialog, diskusi dan sebagainya.

#### a. Pengesahan dan Formulasi Kebijakan

Proses pengesahan kebijakan biasa juga disebut pembuatan keputusan. Bila usulan kebijakan telah diadopsi dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka usulan kebijakan tersebut sudah berubah menjadi kebijakan yang sah (*legitimate*). Kebijakan yang sudah sah tadi selanjutnya mengikat semua pihak yang berkaitan atau pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Di negara-negara demokratis, prinsip dasar dalam pengesahan kebijakan adalah "*majority coalition building*" atau "*majority vote*", artinya bila mayoritas pihak-pihak yang terkait dalam proses pengesahan telah setuju, maka pengesahan dapat dilakukan. Di Indonesia, landasan perumusan dan pengesahan kebijakan dilakukan dengan azas "*musyawarah dan mufakat*". Bila terjadi jalan buntu dalam musyawarah dan mufakat barulah dilakukan "*voting*" atau pemungutan suara.

James E. Anderson dalam Islamy (1986) mengemukakan bahwa proses pengesahan kebijakan biasanya dimulai dari kegiatan "*persuasion*" dan "*bargaining*". Kegiatan ini meliputi usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai dari usulan atau ide sehingga mereka (pihak-pihak terkait bargain) menerima sebagai kebenaran bersama. Orang yang mencari dukungan orang lain perlu meyakinkan bahwa pendapatnya benar, dan bermanfaat bagi masyarakat sasaran sesuai kebutuhan, sehingga pihak lain kemudian mendukung dan membenarkan pendapatnya.



### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif karena bersifat pengungkapan fenomena-fenomena secara deskriptif tanpa mempertimbangkan kuantitas kemunculan fenomena, tetapi kedalaman informasi pada setiap fenomenanya. Jabaran metode penelitan sebagai berikut : (1) **tipe penelitian**; penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif karena bersifat pengungkapan fenomena-fenomena secara deskriptif tanpa mempertimbangkan kuantitas kemunculan fenomena, tetapi kedalaman informasi pada setiap fenomenanya. (2) **subyek dan situs/fokus penelitian**: penelitian ini berfokus pada penelusuran stakeholders yang terlibat, prosedur penyerapan aspirasi publik beserta hambatannya dalam persiapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara. (3) **sumber data**; data primer diperoleh dari informan utama, yakni dinas terkait, Kecamatan, Desa dan pelaksanan ADD lainnya yang terpilih. (4) **teknik koleksi data**; pengumpulan data dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan pelaku pendidikan inklusi yang ditentukan melalui penelusuran yang dimulai dari dinas kabupaten. (5) **analisis dan interpretasi data**; data disajikan dengan teknik naratif. (6) **kualitas penelitian** (*goodness criteria*); penelitian ini diharapkan dapat memperoleh keunggulan dalam hal : tema belum banyak dibahas di jurusan ilmu administrasi publik Fisip Undip, menggunakan teknik yang memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga informasi dapat lebih kaya, dan (7) **kelemahan/keterbatasan penelitian** : karena kekhususan lokasi, yakni daerah terpencil yang relatif jauh, kekurangan data tidak dapat maksimal bisa dipenuhi.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1) Model Penyerapan Aspirasi Masyarakat Program ADD di Kabupaten Konawe Utara

1) **Model 1** : Penyerapan dan Proses Pengusulan Kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tidak banyak desa yang melaksanakan proses penyerapan aspirasi dan pengusulan kegiatan ADD sesuai ketentuan. Satu diantaranya adalah Desa Bandaeha. Seperti dituturkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD nya sebagai berikut : Mahmud (Kepala Desa Bandaeha Kec. Molawe Kab. Konawe Utara).

Iya....Begini kalau di desa kami pak selama ini kita sudah menjalankan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dimana kegiatan ADD ini kita jalankan mulai dari kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang diadakan oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Konawe Utara, setelah dari kegiatan Bimtek maka kami mengundang seluruh aparat dan tokoh masyarakat desa Bandaeha untuk kami melakukan musyawarah desa guna membahas

program berdasarkan usulan dari masyarakat maupun dari perwakilan kelompok masyarakat lainnya, dari musyarah yang dilaksanakan baru kemudian kami menyusun program kegiatan desa dengan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa), setelah semuanya sudah rampung baru kami antar ke Pemerintah Daerah dalam hal ini ke BPMD untuk di perivikasi dan mendapatkan persetujuan baru dapat di bawah ke BPKAD untuk dapat di dicairkan anggaran ke rekening desa kami pak.setelah cair anggaran tahap pertama kemudian kami laksanakan kegiatan kebetulan yang diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) itu pekerjaan drainase, skarang sementara pelaksanaan dan nantinya akan dievaluasi jg oleh masyarakat itu sendiri.... Memang betul pak di kabupaten Pak,... dalam hal ini di BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Konawe Utara itu sudah menyiapkan draft dan kami diminta juga kalo mau masukan aja usulannya kemudian diterima beres uangnya tinggal laksanakan saja pekerjaan,,, tapi saya berfikir kecuali kami di kampung sini sudahh tidak ada yang bisa kerja baru kita kasi orang di BPMD, tapi kan kita bisa sendiri pak,,, asal kita kerja sesuai dengan juknis yang ada dan kita mau sabar pasti bisa dan terbukti terlaksana juga...

Sementara itu hal senada disampaikan oleh Drs. Hikmar (Ketua BPD Desa Badaeha Kec. Molawe Kab. Konawe Utara):

Begini Pak...Kalau di desa kami ini memang sudah menjalankan program kebijakan ADD ini dengan baik, karena setau kami Pak....aturannya sudah ada, jadi buat apa lagi kita mau pergi laksanakan tidak sesuai dengan aturannya atau petunjuk teknisnya yang ada karena sekarang Pak masyarakat sudah tau dan paham dari program ini.....tapi yang terpenting memang, saya selaku Ketua BPD Desa Badaeha sudah mewanti-wanti kepada Pak Desa dan aparatnya.. ..

agar jangan mencoba coba untuk melakukan program ini di luar ketentuan. Kalau kami tau maka konsekuensi hukumnya Pak Desa harus bertanggungjawab,,, apami juga gunanya kita punya aparat hampir semua sarjana punya kemampuan, dan disinilah kita buktikan bahwa kita juga punya sumber daya dan mampu untuk melaksanakan jika diberi tanggung jawab. Jadi saya secara pribadi dan secara kelembagaan salut dengan Pak Desa.

## 2) Model 2 :Pelaksanaan program ADD, sesuai dengan perencanaan yang berlaku tetapi pembuatan APBDes nya diserahkan kepada BPMD Kab. Konawe Utara

Banyak desa yang proses penyerapan aspirasi melalui rembug desa, tetapi pembuatan dokumen usulan diserahkan kepada BPMD. Satu diantaranya adalah Desa Puulemo.Berikut penuturan Kepala Desa Puulemo.

Bambang (Kepala Desa Puulemo Kec. Lembo) :

Kalau kami disini Pak khususnya di Desa Puulemo Kec. Lembo...Alhamdulillah sudah memahami kebijakan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe, apalagi sebelumnya kami telah di Bimtek di Kabupaten....sehingga pelaksanaannya sudah sesuai apa yang diharapkan bersama...adapun mekanismenya sudah sesuai dengan hasil pelatihan tadi itu Pak....hanya terus terang saja Pak terkadang kami juga bingung kembali.....kita mau memulai dari mana....hal ini karena disebabkan kami disini Pak di Desa Pulemo sangat keterbatasan yang namanya sumber daya manusia,

kalau saat rapat semua bicara ini itu, tiba sudah pelaksanaan apa yang menjadi keputusan sdh tidak ada yang bersedia laksanakan....sehingga hasil-hasil musyawarah yang kami lakukan itu belum bisa kami buat sesuai dengan apa yang telah diajarkan waktu ikut bimbingan teknis....untuk mengantisipasi itu Pak kami antar saja ke BPMD dan disana kami minta tolong untuk dibantu dalam hal pembuatan rancangan APBDes yang akan kami usulkan nantinya. Tapi pada intinya semua proses sudah kami laksanakan hanya untuk menjadikan semua itu dalam konsep yaa terus terang saja kami sangat terbatas, tapi hasilnya kan tidak keluar dari aturan yang ada.

Sementara itu salah seorang warga Hj. Marni (Tokoh Masyarakat Desa Puulemo)

menuturkan :

Saya ini Pak hanya masyarakat kecil, mana kita tau masalah program ini itu.....hanya saya melihat kan sudah pernah rapat tentang adanya katanya program dari Kabupaten yang namanya ADD, hanya itumi juga kami liat sudah rapat bertengkar ini itu kemudian diam, eh tau-taunya sudah ada kegiatan..... yaa syukurlah kita juga ini selama jadi masyarakat belum pernah dilibatkan secara langsung dalam kegiatan seperti inisebelumnya,, tiba-tiba kami juga kasian sudah ikut dalam perencanaan dan bahkan saya sudah pernah ditawarkan bantuan berupa penambahan modal kios saya yang saya kelola...

**3) Model 3 :** Pelaksanaan program ADD, mulai dari usulan rencana, sampai pembuatan APBDes nya diserahkan kepada BPMD Kab. Konawe Utara

Mayoritas desa di Kabupaten Konawe Utara masuk dalam kategori ini. Berikut penuturan salah seorang Kepala Desa.

Weli (Kepala Desa Wawolesea Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara):

Iya Kalau di Desa kami Pak, pelaksanaan ADD sudah terlaksana, nah kalau persoalan kenapa kita tidak rapat dan bahkan kenapa kita serahkan saja ke BPMD maa jujur saja sa bilang begini,,, pertama, Masyarakat saya disini tidak sama dengan masyarakat di desa lain, disini Pak dipanggil rapat belum tentu mereka mau hadir karena mereka pada sibuk semua, yang kedua belum lagi yang datang rata-rata apa yang kami bilang itumi semua yang diterima, jadi saa pikir-pikir dari pada bikin lama-lama hasilnya akan begitu juga mending kita langsung saja, n dyang ketiga disini aparat saya kasian rata-rata serba terbatas, jangankan mau bikin ini berfikir saja kadang kala mereka malas, karena mereka taunya bagaimana saya rencanakan yang penting mereka sudah dikasi tau, mereka sudah tidak macam-macam lagi.....Nah dasar dari situlah dari pada kita pusing-pusing bikin lama lebih baik saya cari jalan cepat, kebetulan juga ada yang bisa bantu maa saya kasi begitu saja, buktinya mereka semua masyarakat terima juga apa yang kita programkan dan terbukti semua yang kita rencanakan terlaksana juga seperti ketentuan yang sudah ditegaskan oleh pemda....pada intinya asal kita mau dan tidak melanggar aturan, semua bisa diatur.

Sementara itu Musnah (Aparat Desa Wawolesea Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara):

Saya sebagai Aparat Desa Wawolesea selama ini hampir tidak pernah tau kalau ada program ADD yang sedang berjalan, justru yang saya tau itu adalah program dari pemerintah provinsi yaitu Blok Grand....begini pak apa yang disampaikan Ibu Kepela Desa saya tidak sependapat karena selama ini saya tidak pernah di undang sebagai

masyarakat tiba-tiba saja ada program yang dilaksanakan....kalau alasan sumber daya manusia disini terbatas atau kurang itu juga tidak benar karena disini sudah banyak juga tau dengan komputer kalau hanya mau mengetik usulan program dan APBDesa...jadi mungkin harapan saya Pak sebagai masyarakat agar kedepan ini harus diperbaiki sistemnya maupun model pelaksanaan dari kebijakan ADD yang sedang berjalan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.... Jadi yang saya tau mereka atur sendiri biar mereka bebas, tidak ada yang ganggu.....

## 2) Hambatan Utama

Syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 1997:71-78 ).

Lembaga-Lembaga Desa belum mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan ADD bahkan terdapat desa yang tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana pedoman yang ada, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD dan juga tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan ADD, semua rencana kegiatan dan pemberkasan **diserahkan kepada BPMD.**

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat masih mengalami hambatan. Hambatan utama terkait dengan manajemen pemerintahan desa



yang belum mendapatkan formula yang tepat dalam pelibatan masyarakat terutama dalam penyerapan aspirasi. Hal tersebut dikarenakan antara lain oleh :

- 1). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- 2). Lemahnya Kemampuan manajerial perangkat desa dan institusi desa lainnya
- 3). Gagalnya mekanisme sosialisasi dan peningkatan *capacity building* oleh BPMD kepada desa

### 3) Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada pelaksanaan Program ADD di Kabupaten Konawe Utara ke depan

Komunikasi merupakan faktor penting dalam penyerapan aspirasi. Sering terjadi bahwa gagalnya suatu kebijakan publik mencapai tujuannya disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaksana terhadap perintah-perintah pelaksanaan, baik konteks maupun konten dari kebijakan itu sendiri. Untuk itu suatu kebijakan hendaknya perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana kebijakan dapat mengerti dan memahami apa yang harus diperbuat. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Robbins (2002:146), yaitu “penyampaian dan pemahaman dalam sebuah arti.” Dalam konteks implementasi kebijakan publik, Edwards (Winarno, 2012:178) menyebut tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni “transmisi, konsistensi dan kejelasan.” Bahwa kebijakan yang telah diputuskan harus diteruskan kepada pelaksana (*implementor*) agar diikuti. Komunikasi itu harus akurat, jelas dan konsisten agar dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana, tidak menimbulkan interpretasi dan bahkan membingungkan.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edwards III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

- 1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan.
- 2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

- 3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa aspek pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Aspek penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum maksimal bahkan terkesan tidak tepat sasaran, sehingga pemahaman masyarakat mengenai tujuan ADD sangat kurang, hal ini berakibat pada sulitnya mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ADD maupun dalam hal pengawasan kegiatan. Di sisi lain permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula direncanakan dan anggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme perencanaan penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan pada tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang kebijakan ADD sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program atau kegiatan yang didanai oleh ADD. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk diprogramkan dalam kegiatan ADD.

Atas dasar hal tersebut, dalam mengimplementasikan kebijakan ADD di desa-desa sebagai pelaksana kebijakan harus memperhatikan bermacam-macam aspek. Arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan persepsi aparat pelaksana di desa bahkan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Diperlukan pula

dukungan sumber daya *stakeholders* yang terkait dengan proses implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Konawe Utara.

Aspek komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan ADD. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan ADD. Media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran atau pelaksanan di desa akan sangat dibutuhkan.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- 1) Peranan Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan otonomi desa sangat strategis, baik otonomi asli yang berasal dari asal-usul desa sendiri maupun otonomi yang diperoleh sebagai konsekuensi dari azas desentralisasi. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, khususnya Pasal 12 ayat (1) menekankan bahwa : urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.
- 2) Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan hukum baik hukum, publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menggali potensi yang dimilikinya, pemerintah Kabupaten Konawe Utara sedang merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk mpeningkatan sumber daya lokal guna memacu pembangunan yang berskala desa dengan membedakan potensi lokal yang dimiliki desa. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalan salah wujud nyata dalam implementasi otonomi desa tujuannya adalah penguatan kelembagaan masyarakat dalam membangun desa serta penguatan pemerinatahan desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa yang diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

- 3) Implementasi otonomi desa yang sedang berjalan baik di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara maupun di Provinsi dan Kabupaten lain di Indonesia, masih menjumpai berbagai persoalan yang sangat fundamental serta berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi desa itu sendiri, dari sisi perundang-undangan pelaksanaan otonomi desa ini masih sangat kurang hal ini dapat dilihat dari berbagai persoalan yang dijumpai oleh setiap pelaksana pemerintahan desa, baik itu kualitas maupun kuantitas sumber daya yang dibutuhkan sangat terbatas. Sebagai konsekuensi logis maka pemerintah daerah harus bisa membuat suatu kebijakan yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat, pemberian program pembangunan secara langsung ke desa adalah merupakan salah satu solusi sebab dengan program demikian dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan tersebut yang di sebut dengan partisipasi masyarakat.
- 4) Pada bagian kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti tentang otonomi desa yang sedang berjalan dengan berbagai kompleksitas permasalahannya yang bermuara pada kelemahan aturan atau perundang-undangan yang dapat mengakomodir secara utuh kepentingan desa, ini lebih pada sekedar wacana belum pada tujuan otonomi desa itu sendiri yaitu terwujudnya partisipasi desa dalam menjalankan pemerintahannya sebagai ujung tombak dalam otonomi daerah yang mandiri dengan meningkatkan pembangunan yang berskala desa secara adil dan sejahtera.

## 2. Saran

- 1) Petunjuk teknis pelaksanaan (Juknis) ADD perlu di tinjau ulang dan adanya pengajuan rancangan peraturan daerah yang akan di tetapkan menjadi peraturan daerah (PERDA) tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara, sehingga ada regulasi yang baku dan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan ADD di desa.
- 2) Kebijakan alokasi dana desa (ADD) sangat dibutuhkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan ada sejumlah desa di wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah desa yang dikategorikan desa miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan alokasi dana desa guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah lain atau desa lain yang

- Cohen, Louis, & MManion, Lawrence. 1994, *Research Methods in Education*. New York : Routledge.
- Dunn, William, N. 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, PT Hanindita Graya Widya, Yogyakarta. UGM, Yogyakarta.
- Effendi, Sofyan, 2000, *Kuliah Umum Perdana MAP UNDIP*, Semarang.
- Edward III, George.C, 1980, *Implementation Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Flippo. B. Edwin, 1999, *Personal Management*, Mac Graw Hill Inc., Singapore
- Gordon Judith R. 1990, *A Diagnostic Approach to Organizational Behavior*, Boston ; Allyn and Bacon.
- Handoko, Hani, 1980, *Managemen*, Edisi II,(terjemahan), BPFE, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*. PT Raj Grafindo Persada, Jakarta.
- Harold Koontz, Cyril O'Donnell, 1981. *Prinsip - Prinsip Management*. Bhratara Jakarta.
- Henry Simamora, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- James P, Sprandley, 1980. *Participant Observation*. Holt Rinehart and Winston.
- Mazmanian, Daniel H. and Paul A. Sabatier (eds), 1983. *Implementation and Public Policy* New York: Harper Collins.
- Miles, M & Humberman, M, 1994. *Quatitative Data Analysis*, Sage Publication.
- Moh.Nasir.1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moleong, Lexy, J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moekijat.1990, *Analisa Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Jakarta.
- Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE Yogyakarta.
- Patton, M,Q, 1990. *Quantitative Evaluation and Research Methods* 2<sup>nd</sup> Ed, California; Sage Publications.
- Poerwandari E, Kristi, 1998. *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Terbuka. Jakarta.
- Quade, E.S, 1984, *Analisis For Public Decision*, Nort Holland, New York.



- Robbin, Stepen, P. 2001, *Perilaku Organisasi*, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Samudra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- Singaribun, Masri & Sofyan Effendi, 2000. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta LP3ES.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Samodra Wibawa, 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2002, *Statistik Penelitian*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Solly Lubis, M, 1988, *Kebijakan Publik Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk, 2001, *Birokrasi dalam Polemik*, Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

**Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah :**

Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.



## AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA: TRANSPARANSI KEUANGAN DI ERA OTONOMI DESA

Oleh:

Eva Hany Fanida\*

Fitrotun Niswah\*

(\*Staf Pengajar Prodi S1 Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya  
efanida@yahoo.com, vita.unesa@yahoo.com)

### *Abstract*

*Desa memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya dengan mengoptimalkan pengalokasian APBDes termasuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa dalam APBDes merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah desa dengan mendapatkan 10% dari APBD untuk alokasi dana desa. Dana tersebut direalisasikan untuk pembangunan sumber daya manusia dan prasarana penunjang yang dibutuhkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa.*

*Lebih jauh lagi, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang dimasukkan dan ditetapkan dalam APBDes. Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance. Salah satu prinsip untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (good governance) harus memperhatikan prinsip akuntabilitas.*

*Akuntabilitas dalam pemerintah desa menuntut keterlibatan dan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Penerapan APBDes yang didalamnya menyangkut ADD tersebut dilakukan kepada seluruh desa di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu adanya suatu tanggung jawab bersama antara pemerintah desa khususnya dengan stakeholder agar anggaran yang disusun dan dikeluarkan dapat berjalan optimal, mencapai sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).*

Keyword : Otonomi Desa, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

### **Pendahuluan**

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut